DAPTAR PUSTAKA

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1994, perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Undang-undang nomor 9 tahun 1994, perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Purwodarminto, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Soelarso, 1984, Administrasi Pajak dan Restribusi Daerah.

5. B.R Saragi, 1981, Himpunan undang-undang

6 Prof. DR. Rohmat Soemitro.SH, 1988, tentang Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan.; 12-13.

7. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak , seri PBB-02 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

8. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak , seri PBB-03 tentang Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Tata Cara Pembayaran PBB.

9. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak , seri PBB-05 tentang Surat Ketetapan Pajak PBB.

10. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak , seri PBB-06 tentang Surat Tagihan Pajak PBB.

11. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak , seri PBB-012 tentang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.